

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tantangan yang dihadapi di Indonesia ialah sampah. Sampah timbul dari kegiatan manusia, dimana pertumbuhan sampah meningkat seiring dengan peningkatan populasi penduduk, konsumsi, dan kemajuan teknologi. Pada tahun 2023, sejumlah 277,534,122 penduduk di Indonesia menyumbang sampah sebesar 68,7 juta ton/tahun (BPS, 2023). Proyeksi pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi peningkatan sampah. Suplai sampah tertinggi di Indonesia ialah pulau jawa (Dipo G.A, 2008:172). Selain itu, pulau jawa ialah pulau yang padat penduduk karena segala kegiatan vital pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian yang menjadikan angka mobilitas penduduk ke pulau jawa meningkat. Dengan demikian, terlihat bahwa penumpukan sampah dipercepat oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan populasi, kenaikan standar hidup, dan urbanisasi yang cepat (Khofifah, 2020).

Pengelolaan sampah menjadi pemasalahan serius bagi Indonesia. Sampah wajib diolah dengan tepat supaya tidak semakin meningkat, karena jumlah tumpukan sampah telah menyentuh 175.000 ton/hari. Mengacu pada hasil riset yang dijalankan, berikut ialah pola pengelolaan sampah di beberapa kota di Indonesia; 69% diangkut dan ditimbun di TPA, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 7% sisanya tidak terkelola. Saat ini, 90% lebih kota/kabupaten di Indonesia masih menggunakan sistem *open dumping*, yakni sampah hanya dibuang ke tempat

pembuangan akhir tanpa dikelola. Selain itu, terbatasnya pengelolaan dan pemilahan sampah menjadikan sampah menumpuk di TPA (Fitri, 2019).

Perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan *trend* baru yang menarik di teliti (Ansell dan Gash, 2008). Dalam kebijakan publik bagian lingkungan hidup tersirat di beberapa regulasi pemerintah untuk melibatkan *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) di Indonesia. Bermulaan pemerintahan berpola *collaborative governance* terlihat semakin berkembang di berbagai daerah seiring dengan adanya agenda otonomi daerah. *Collaborative governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki para pemegang kepentingan tersebut (Sambodo, 2016).

Prinsip dan konsep *collaborative governance* yang telah diterapkan di berbagai negara atau daerah relatif sama. Adapun yang membedakan terletak pada sektor, tujuan, struktur, proses dan dampaknya. Adanya perbedaan tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk dipahami dan dikaji lebih dalam terutama pada kasus yang terjadi di tingkat Kabupaten atau Kota. Komitmen dan kewenangan diantara *stakeholders* di setiap daerah atau kota selalu memiliki dinamika tersendiri. Lokalitas daerah yang bisa memunculkan perbedaan antara satu daerah atau

wilayah lainnya. Mengkaji suatu kasus tata pemerintahan, *collaborative governance* dimaksud untuk memahami potret *best practies* (praktek-praktek terbaik) dan *worst practices* (praktek-praktek terburuk) (Gray dkk, 2007).

Anshell dkk (dalam Tresiena dkk, 2017) mengkonfirmasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, dan terdapat aktor-aktor yang kompeten.

Kabupaten Batang pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 817.100 jiwa (BPS Kabupaten Batang, 2022). Setiap hari, kabupaten Batang memproduksi 40 ton sampah dengan rata-rata pengangkutan hanya 50 ton sampah per hari dan daya tampung 35 ton sampah/hari. Hal ini mengakibatkan meluapnya muatan sampah di TPA yang bisa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar (Darmasaputra, 2020). Satu-satunya tempat pembuangan akhir di Kabupaten Batang ialah TPA Randukuning. Dimana, TPA ini masih menggunakan sisten *open dumping* yang berarti sampah tidak dikurangi/dikelola sebelum dibuang ke TPA. Sehingga, TPA Randukuning menuntut pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan pengelolaan sampah (Darmasaputra dan Hariani 2019). Selain itu pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan kualitas pelayanan kebersihan masih belum baik. Hal ini yang menyebabkan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak layak pakai, dan tidak terawat yang menyebabkan terhambatnya pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir. Pemerintah Kabupaten Batang perlu melaksanakan *collaborative governance* dalam pelaksanaan

pengelolaan sampah yang efisien mengingat banyak kekurangan dalam aspek-aspek penting pengelolaan sampah.

Tabel 1.1
Perkembangan Volume Sampah di Kabupaten Batang

Tahun	Produksi Sampah (M³)	Terangkut (M³)	Presentase
2010	243,29	141,99	58,36
2011	249,48	145,98	58,51
2012	252,42	149,54	59,24
2013	261,53	152,16	58,15
2014	265,30	157,78	59,47
2015	313,20	195,70	62,48
2016	390,90	244,30	62,50
2017	344,96	71,95	20,86
2018	228,71	76,51	33,45
2019	230,57	81,63	35,40
2020	227,14	79,69	35,08
2021	182,61	86,66	47,46
2022	243,25	101,60	41,77

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang, 2023

Diliat dari tabel di atas produksi sampah yang terjadi tergolong masih tinggi sedangkan sampah yang terangkut setiap tahun terus menurun hal ini menyebabkan pengelolaan sampah masih kurang maksimal. Dalam merespon kondisi ini,

Pemerintah Kabupaten Batang perlu melaksanakan *collaborative governance* mengenai pengelolaan sampah dengan harapan kesehatan masyarakat terjamin, keadaan lingkungan semakin membaik dan bisa memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Meskipun dalam penerapannya masih minim karena perkembangan volume sampah yang terangkut untuk disalurkan pada sarana prasarana persampahan di wilayah Kabupaten Batang sebesar 47,46% (BPS Kabupaten Batang, 2022). Dimana target pelayanan sampah Kabupaten Batang pada tahun 2021 ialah 74% untuk sampah rumah tangga dan sejenisnya sesuai dengan Perbup No. 40/2019.

Sumber daya manusia di DLH Kabupaten Batang masih memiliki kekurangan dari segi kuantitas yang mana jumlah pengelola sampah dari bidang UPT Persampahan belum bisa menangani sampah di 15 kecamatan Kabupaten Batang. Selain itu masih banyak kekurangan dalam pemenuhan fasilitas untuk menangani sampah yang ada di Kabupaten Batang, dan berikut data fasilitas penanganan sampah di Kabupaten Batang (Damanhuri dan Padmi 2019). Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dapat menghambat keberjalanan dari pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Batang. hal ini diperlukan kerjasama melalui *collaborative governance* dengan sektor swasta untuk dapat membantu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.

Gambar 1. 1

Sarana Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kabupaten Batang

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Banyaknya Sarana Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Ba													
2	Number of Garbage Facility and Waste that Managed Service of Living Environment by Subdistrict in Batang Regency, 2023													
3														
4														
5														
6	KecamatanSubdi	Truk San	Truk Kor	Kontaine	Gerobak	Tempat F	Tempat	Truk Tini	Transfer	Instalasi	Mobil Ke	Roda 33	Truk Urir	
7	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
8	010 Wonotunggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	020 Bandar	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	3	-
10	030 Blado	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
11	040 Reban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
12	050 Bawang	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
13	060 Tersono	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
14	070 Gringsing	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-
15	080 Limpung	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
16	081 Banyuputih	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
17	090 Subah	-	-	-	1	2	6	-	-	-	-	-	-	
18	091 Pecalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	100 Tulis	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
20	101 Kandeman	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
21	110 Batang	9	4	11	115	49	-	2	1	-	-	4	9	-
22	120 Warungasem	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	
23	Jumlah 2023	15	4	12	121	81	1	2	1	0	4	21	0	
24														
25	Sumber : Dinas Lingkungan Hidup													
26	Source : Service of Living Environment													

Sumber: *Batangkab.go.id*

Dilihat dari gambar di atas fasilitas penanganan sampah di setiap kecamatan Kabupaten Batang masih banyak yang kurang terpenuhi yang menyebabkan penanganan sampah masih belum maksimal. Oleh sebab itu, tindak lanjut pengelolaan sampah di Kabupaten Batang membutuhkan *collaborative governance* dari seluruh komponen baik Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, sektor swasta, dan masyarakat untuk bisa saling berkolaborasi mewujudkan pengelolaan sampah.

Mengacu pada pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menjalankan riset mendalam dengan tujuan untuk meneliti proses keberjalanan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, swasta, dan masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan dan program pengelolaan sampah di Kabupaten Batang, serta memperkaya literatur akademis

tentang kemitraan sektor Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dalam konteks pelaksanaan kebijakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan tambahan sumber pengetahuan, informasi atau wawasan mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan. penelitian ini juga dapat diharapkan menciptakan konsep berpikir yang akan dijadikan fondasi bagi penelitian selanjutnya di bidang pengelolaan sampah terutama dalam hal pendekatan *collaborative governance* dalam penerapan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan memberikan manfaat dan saran bagi para pemangku kebijakan publik dan pemerintah baik di level daerah maupun nasional dalam kaitannya dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk meningkatkan lingkungan yang bersih dengan pengelolaan sampah yang baik.

2. Bagi Swasta

Dalam penelitian ini, peneliti berharap mampu memberikan manfaat terhadap sektor swasta dalam membantu mewujudkan lingkungan yang bersih dan dapat membuat, mendistribusikan, dan menjual barang dari pengelolaan sampah dengan kemasan semenarik mungkin. Serta dapat berperan proaktif dalam upaya konkret untuk melaksanakan pengurangan sampah.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, peneliti berharap mampu memberikan manfaat untuk masyarakat dalam memperluas wawasan serta pengetahuan pada kajian ilmu pemerintahan khususnya mengenai suatu *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kebersihan yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat berguna

bagi mahasiswa terkhususnya untuk mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan yang juga suatu saat akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, sehingga penelitian ini dapat dilakukan acuan.

4. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti mendapat wawasan setra ilmu baik secara teori maupun praktis. Selain itu, peneliti juga berharap pengalaman melalui penelitian ini mampu bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan peneliti.

1.5 Literature Review

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Studi pertama dilakukan oleh Muhammad Wildan Afif pada tahun 2024 dengan judul “Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Organik (Studi Kasus Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang)” (Afif, 2024). Penelitian tersebut berfokus pada *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kota Magelang. Tujuan dari penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana *Collaborative Governance* yang terjadi dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rejowinangun Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori *Collaborative Governance* dari Anshell dan Gash (2007). Hasil dari penelitian tersebut dilihat dari 4 dimensi penting dalam mengukur keberhasilan kolaborasi yang terdiri dari *starting condition* (kondisi awal),

institutional design (desain institutional), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif), dan *process collaboration* (proses kolaborasi). Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Rejowinangun Selatan belum cukup baik.

Studi kedua dilakukan oleh Andi Nur Qalby pada tahun 2018 dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar” (Qalby, 2018). Penelitian tersebut menjelaskan sebuah program yang diluncurkan Pemerintah Kota Makassar dengan pengelolaan sampah kolaborasi bersama swasta dan masyarakat yang berbentuk bank sampah. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori *Collaborative Governance* dari Anshell dan Gash tahun 2012. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sudah berjalan dan memiliki keuntungan dalam proses inovasi berjalan, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya nasabah dalam pengelolaan sampah, akan tetapi dalam pencapaian inovasi kurang efektif.

Studi ketiga dilakukan oleh Khairul Amri pada tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru” (Amri, 2023). Penelitian tersebut menjelaskan mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, permasalahan yang diteliti yaitu mengetahui *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah dengan mengetahui faktor penghambat dan pendukung *collaborative governane*. Metode

yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori *Collaborative Governance* dari Anshell dan Gash (2012). Hasil penelitian tersebut adalah dalam pengelolaan sampah ditemukan bahwa kepercayaan kepada Pemerintah masih kurang karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan komunikasi yang terjalin masih kurang dengan adanya keterlambatan informasi yang didapatkan oleh masyarakat. faktor pendukung yaitu sumber daya yang memadai, adanya otoritas atau kewenangan, komitmen yang kuat. Faktor penghambat yaitu kurangnya kepercayaan dan keterbatasan informasi.

Studi keempat dilakukan oleh Siti Jahro pada tahun 2018 dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, Dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan” (Jahro, 2018). Penelitian tersebut menjelaskan munculnya bank sampah di Kabupaten Pasuruan dikarenakan adanya permasalahan ketidak efektifan pengelolaan sampah yang menimbulkan jumlah timbunan sampah yang masuk ke TPA sangat tinggi dan menyebabkan *overload*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan adalah teori *Collaborative Governance* dari Morse dan Stephens (2012). Hasil penelitiannya adalah menunjukan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah telah dilaksanakan mulai dari tahapan penilaian, inisiasi, deliberasi hingga implementasi. Kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan masih bersifat semiformal yakni hanya berdasarkan pada komitmen para pemangku kepentingan yang terlibat.

Persamaan dengan studi yang akan dilakukan ialah sama-sama melakukan penelitian tentang hubungan antara *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Riset akan dijalankan di Kabupaten Batang, sedangkan penelitian di atas dilakukan di Pasuruan, Pekanbaru, Makassar, dan Magelang.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang membahas mengenai *collaborative governance* dalam peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Penelitian tersebut akan menjadi pembanding pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah untuk melihat apakah terdapat hasil yang sama atau berbeda dengan riset yang akan berjalan di Kabupaten Batang. Riset yang akan dilakukan membahas mengenai pola kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Batang, swasta, dan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Studi ini akan berfokus pada konsep *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah. Riset ini akan menjadi kebaruan dari penelitian terdahulu pertama yang membahas kolaborasi dalam peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dengan lokasi yang berbeda, fokus masalah yang lebih spesifik, serta melihat indikator keberhasilan dari konsep *collaborative governance* pada pengelolaan sampah di Kabupaten Batang.

1.5.2 Collaborative Governance

Definisi *collaborative governance* secara luas merupakan proses dan struktur pengambilan keputusan publik dan manajemen kebijakan yang melibatkan orang-orang secara konstruktif di seluruh batas-batas badan publik, tingkatan

pemerintahan, swasta, dan sipil untuk menjalankan tujuan umum yang tidak bisa digapai dengan cara lain (Emerson, Tina, & Stephen, 2011).

Collaborative governance ialah sistem pemerintahan yang secara aktif melibatkan pihak-pihak non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bersifat resmi, mengutamakan kesepakatan, dan diskusi mendalam yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik (Ansell & Gash, 2007).

Robertson dan Choi (2010) menjelaskan bahwa *collaborative governance* ialah proses pengambilan keputusan yang adil dan kolektif, yang memberikan otoritas kepada setiap partisipan dan memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu terdapat juga pendapat oleh Jung, *et.al* yang mendefinisikan mengoperasionalisasi, memonitor, dan memfasilitasi pengaturan organisasi lintas setoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu publik sendiri atau organisasi (Jung, Mazmanian, & Tang, 2009).

Bryson, Crosby, dan Stone (2006) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai kerjasama antar lintas sektor yang dapat terlihat melalui penekanan lima hal yaitu:

1. Kondisi awal yang berfokus pada tema kolaborasi lingkungan yang luas, resiko yang dihadapi, dan syarat khusus yang wajib dipenuhi.
2. Komponen proses para peneliti menekankan beberapa aspek dalam proses kolaborasi.

3. Struktur dan tata kelola merupakan konsep organisasi yang berkembang meliputi beberapa unsur misalnya tujuan, pembagian kerja dan spesifikasi tugas, standar dan aturan prosedur operasi, dan hubungan otoritas.
4. Kontingensi dan kendala yang berdampak pada proses, yakni struktur, tata kelola kolaborasi, dan keberlanjutan menyeluruh.
5. Hasil dan akuntabilitas, hasil merupakan kombinasi tiga kategori lintas sektor, yakni nilai publik; efek pertama, kedua, dan ketiga; ketahanan dan evaluasi. Dalam kerjasama, akuntabilitas ialah persoalan yang rumit sebab tidak jelas kerjasama tersebut untuk apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Dalam penilaian hasil, antar satu anggota dengan yang lain bisa memiliki persepsi yang berbeda.

Mengacu pada teori diatas bisa disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan peraturan yang dimana memiliki proses dan struktur dalam pengambilan keputusan publik serta mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan. *Collaborative governance* ialah proses pengambilan keputusan yang adil dan kolektif, yang memberikan otoritas kepada setiap partisipan dan memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi mereka. *Collaborative governance* memiliki pendekatan antara lain kondisi awal, komponen proses, struktur dan tata kelola, kontingensi dan kendala, hasil dan akuntabilitas.

1.6. Operasional Konsep

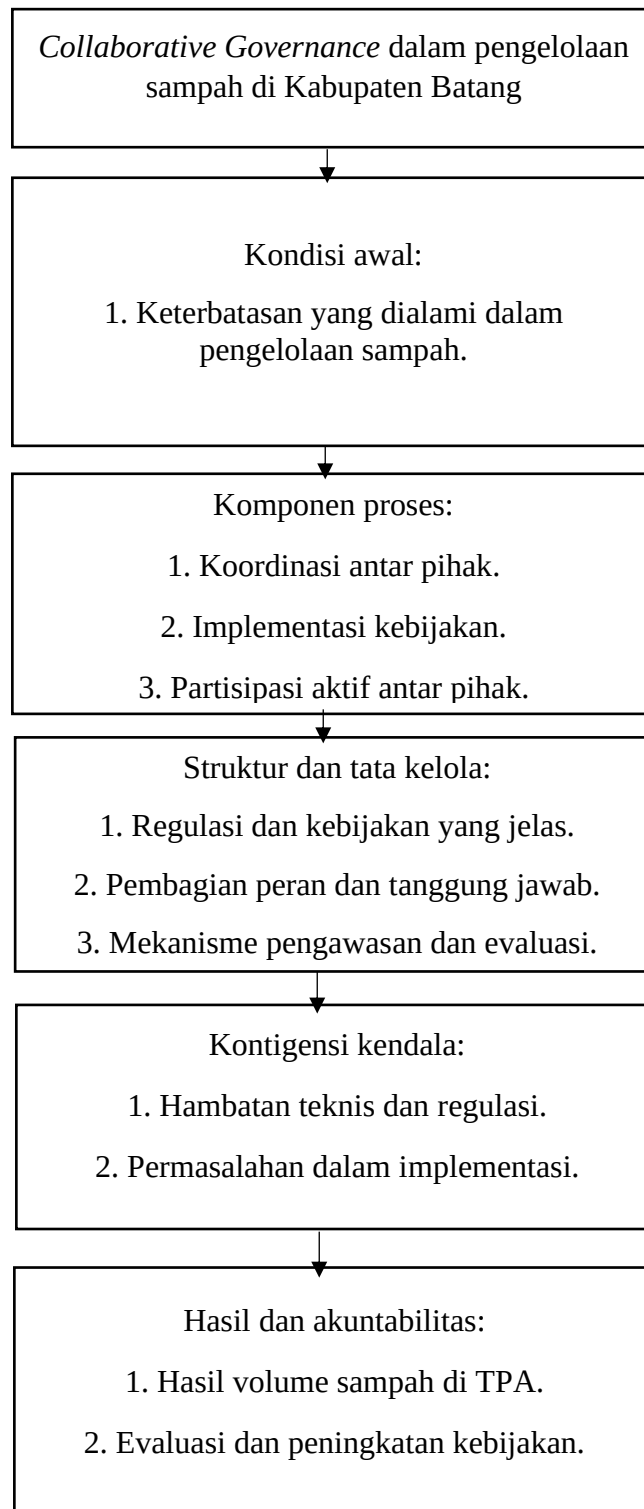
Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang lahir sebab adanya kekurangan dalam

pengelolaan sampah yang menyebabkan tempat pembuangan akhir tidak dapat menampung muatan sampah. Maka dari itu pada penelitian ini, aspek yang akan diteliti dalam terciptanya keberhasilan peraturan daerah adalah:

Konsep	Indikator	Sub Indikator
<i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang	Kondisi awal	1. Peluang kegagalan yang akan dihadapi. Mengacu pada faktor-faktor yang bisa menyebabkan gagalnya <i>collaborative governance</i>. 2. Syarat khusus yang dipenuhi agar segera terbentuk kolaborasi. Merujuk pada elemen-elemen yang harus ada sebelum kolaborasi dapat berjalan, seperti dukungan regulasi, kesepakatan bersama, dan adanya kepercayaan antar pihak yang terlibat.
	Komponen proses	1. Aspek dalam proses kolaborasi. Menjelaskan tahapan dan mekanisme yang terjadi dalam kolaborasi.
	Struktur dan tata kelola	1. Tujuan. Menetapkan apa yang ingin dicapai dari kolaborasi pengelolaan sampah, seperti efisiensi pengelolaan, dan pengurangan volume sampah. 2. Pembagian kerja dan spesifikasi tugas. Menjelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi antara berbagai aktor, termasuk Pemerintah Kabupaten Batang, masyarakat, dan PT. Ardhya Rizky Laju Abadi dalam pengelolaan sampah. 3. Standar dan aturan prosedur. Menjelaskan regulasi atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti dalam kolaborasi.

		4. Hubungan otoritas. Menjelaskan struktur hierarki dan mekanisme pengambilan keputusan dalam kolaborasi.
	Kontigensi dan kendala	1. Proses. Menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan proses kolaborasi. 2. Struktur. Menjelaskan kendala dalam desain struktur kolaborasi. 3. Tata kelola kolaborasi. Menjelaskan tantangan dalam manajemen kolaborasi. 4. Keberlanjutan secara keseluruhan. Menjelaskan faktor-faktor yang bisa mengancam keberlangsungan kolaborasi dalam jangka panjang.
	Hasil dan akuntabilitas	1. Nilai publik. Menjelaskan manfaat yang diperoleh masyarakat dari kolaborasi. 2. Efek pertama (hasil langsung dari proses kolaborasi), efek kedua (perubahan yang lebih luas), dan efek ketiga (hasil yang lebih jauh lagi). 3. Ketahanan dan penilaian kembali. Menjelaskan seberapa kuat kolaborasi yang dilakukan bertahan menghadapi tantangan serta bagaimana evaluasi dan perbaikan dilakukan agar terus efektif.

1.7. Kerangka Berpikir



1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Studi ini berjalan dengan teknik kualitatif, yang menurut John. W Creswell (Creswell, 2016) penelitian kualitatif ialah penelitian yang mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelurusan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dengan melakukan wawancara kepada peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas, yang kemudian informasi tersebut dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi lebih dalam.

Metode pendekatan riset ini ialah studi kasus (*case study*), yang merupakan strategi kualitatif yang mengkaji suatu program, proses, dan kejadian satu atau lebih individu yang mendalam. Hal-hal tersebut terbatas oleh aktivitas dan waktu, sehingga peneliti menggunakan berbagai macam cara dalam mengumpulkan data untuk mendapat informasi selama periode tertentu (Cresswell, 2017)

1.8.2. Lokasi Penelitian

Riset ini berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Untuk lokasi dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri berada di Jl. RA Kartini Nomor 1 Batang, Bogoran, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pelaku kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, serta masyarakat, pihak swasta PT. Ardhya Rizky Laju Abadi,

dan masyarakat petugas kebersihan TPS yang ikut terlibat dalam terwujudnya keberhasilan pengelolaan sampah.

1.8.4. Penentuan Informan

Riset ini tergolong dalam jenis *purposeive sampling*, yakni teknik pengambilan data dari sumber dengan syarat tertentu, seperti sumber informan dipilih karena dianggap yang paling paham dengan kejadian (Sugiyono, 2009). Informan ini benar-benar memahami hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mewujudkan keakuratan data yaitu:

1. Puguh Santoso, ST (Kabid PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang).
2. Ninuk Ardiani (Direktur PT. Ardhya Rizky Laju Abadi).
3. Rusmianto (masyarakat/petugas kebersihan TPS)
4. Sulistyio (masyarakat/petugas kebersihan TPS)

1.8.5. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil dari wawancara dengan informan mengenai rangkaian informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan

narasumber yang memahami akan topik penelitian dan pedoman yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder didapat secara tidak langsung melalui penelusuran data olahan dari lembaga yang berwenang serta beberapa data pelengkap seperti literatur, surat kabar, jurnal ilmiah, internet, tabel, atau bagan dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa tahapan pengumpulan data, dimulai dari pembatasan riset, pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi baik yang terstruktur ataupun tidak, mater-materi visual, dokumentasi, hingga perancangan protokol untuk mencatat atau merekam informasi (Cresswell, 2017). Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data seperti:

1. Mengidentifikasi lokasi atau individu yang dipilih pada proposal penelitian.
2. Menjelaskan jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara, pengumpulan dokumen (dokumentasi).
3. Menentukan jenis-jenis strategi yang akan digunakan menurut kajian kelebihan dan kelemahan masing-masing strategi.

Pengumpulan data pada studi ini berlangsung dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan peneliti dengan melakukan *face-to-face*

interview (wawancara tatap muka) dengan informan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, sambil merekamnya dengan *audiotape*, lalu mentranskripsinya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen kualitatif baik yang bersifat publik (suara kabar, makalah, laporan kantor), maupun privat (jurnal pribadi, surat, email, notulen rapat). Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Cresswell mengungkapkan bahwa, pada penelitian kualitatif analisis data adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Langkah-langkah ini adalah:

1. Mengorganisasi dan mempersiapkan data

Mengorganisasi dan mempersiapkan data meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber dengan melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian mentranskrip hasil wawancara dan membaca keseluruhan data untuk mendapatkan pemahaman.

2. Membaca dan menganalisis data secara keseluruhan

Membaca dan menganalisis data secara keseluruhan adalah melakukan pembacaan data secara keseluruhan untuk memahami makna utama dari informasi yang diperoleh.

3. Identifikasi kategori umum atau tema dan mengklasifikasikannya

Identifikasi kategori umum atau tema dan mengklasifikasikannya adalah mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam data yang relevan dengan penelitian, memberikan label atau kategori ada setiap temuan utama, serta mengelompokan data berdasarkan tema-tema yang muncul.

4. Mengintegrasikan dan meringkas data untuk audiens

Mengintegrasikan dan meringkas data untuk audiens adalah menyajikan penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik bagi pembaca akademik maupun non-akademik.

1.8.8. Validasi Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data didapatkan dengan cara melakukan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, didukung dengan beberapa informasi lainnya terkait dengan topik penelitian yang diperoleh dari para informan yang telah ditentukan dan dianggap berkompeten dalam memberikan informasi dibutuhkan. Dalam bukunya, Cresswell mengatakan bahwa salah satu kekuatan dari penelitian kuantitatif. Hal tersebut dapat menunjang kemampuan peneliti dalam penilaian kakuratan hasil penelitian dan menyakinkan pembaca mengenai akurasi penelitian. Berikut ialah delapan strategi validitas mulai dari yang paling mudah hingga paling susah (Cresswell,2017):

- a. Mentrangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.
- b. Menerapkan member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian.

- c. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian.
- d. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian.
- e. Menyajikan informasi “Yang berbeda” atau “negatif” (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
- f. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*) dilapangan atau lokasi penelitian.
- g. Melakukan tanya-jawab dengan sesama rekan peneliti (*peer debriefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
- h. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk mereview keseluruhan proyek penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan strategi validitas *triangulate*, yaitu menggali kebenaran suatu data atau informasi melalui berbagai sumber dan metode yang beragam seperti wawancara dan dokumentasi, serta melakukan *member checking* dengan informan yang beragam. *Triangulate* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai perspektif untuk mengidentifikasi kesamaan pola atau perbedaan dalam informasi yang dikumpulkan. *Triangulate* bertujuan untuk memverifikasi temuan penelitian dengan melihat apakah informasi yang diperoleh tetap konsisten dari berbagai sumber yang berbeda.